



RUANG BERSAMA INDONESIA DAN AKSELERASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Sali Susiana*

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada 22 Desember 2024. Tulisan ini membahas pemanfaatan RBI untuk melakukan akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa RBI bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak, namun masih terdapat beberapa catatan terkait RBI. Pertama, RBI belum memiliki dasar hukum. Kedua, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah ada sebelumnya, perlu diperjelas statusnya. Ketiga, belum ada juklak dan juknis RBI. Meskipun demikian, RBI tetap dapat dimanfaatkan untuk akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. DPR RI melalui Komisi VIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendorong KemenPPPA untuk membuat dasar hukum RBI berikut juklak dan juknis, serta memperjelas status DRPPA sehingga RBI lebih optimal dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pendahuluan

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai International Women's Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional. Tema IWD tahun 2025 adalah "Accelerate Action" yang berarti mempercepat tindakan menuju kesetaraan gender (Widya, 2025). Menurut laman resmi IWD, tema ini menjadi seruan global untuk meningkatkan momentum dan urgensi dalam mengatasi hambatan sistemik serta bias yang masih dihadapi perempuan di berbagai aspek kehidupan ("IWD 2025 Campaign", 2025).

Berdasarkan data dari World Economic Forum, dunia baru akan mencapai kesetaraan gender sepenuhnya pada tahun 2158 atau sekitar 5 generasi dari sekarang (World Economic Forum, 2024). Hingga saat ini kesetaraan gender masih menjadi permasalahan global. Rata-rata kesetaraan gender global pada tahun 2024 berada pada skor 68,5% (World Economic Forum, 2024). Sumber yang sama juga menyebutkan, negara dengan kesetaraan gender

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sali.susiana@dpr.go.id

tertinggi di dunia tahun 2024 adalah Islandia, dengan skor 93,5%. Sementara itu skor kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 68,6% atau 0,01% lebih tinggi dari rata-rata global.

Terkait kesetaraan gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki 3 program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045, yaitu (1) Ruang Bersama Indonesia (RBI); (2) perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129; dan (3) penguatan “Satu Data Perempuan dan Anak” berbasis desa. Tulisan ini akan membahas tentang pemanfaatan RBI untuk melakukan akselerasi kesetaraan gender.

Ruang Bersama Indonesia (RBI)

RBI merupakan pusat dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai kelanjutan dan penguatan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sebelumnya telah menjangkau lebih dari 3 ribu desa (Indonesia.go.id, 2024). RBI diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2024 di enam titik secara serentak. Keenam titik tersebut berada di enam desa/kampung dari enam provinsi, yaitu Kampung Jimpitan Kelurahan Batujaya Kota Tangerang, Banten; Desa Cempluk Kabupaten Malang, Jawa Timur; Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi, Jambi; Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan; Desa Ayula Selatan Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; dan Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada 17 Januari 2025, Menteri PPPA juga meluncurkan RBI di 12 desa/kelurahan di Provinsi Bali (Kono, 2025).

Menteri PPPA menyatakan bahwa RBI diharapkan dapat menjadi ruang di mana pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak (Kono, 2025). Melalui RBI, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menciptakan ruang belajar, pelatihan keterampilan, serta tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa. RBI juga diharapkan menjadi solusi kreatif untuk tantangan digitalisasi, seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional dan edukasi berbasis budaya. Bagi perempuan, RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Selain itu, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak.

Peluncuran RBI merupakan langkah awal dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak (Dewi, 2025). RBI juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan (Kono, 2025). Perempuan Indonesia diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi dan memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan.

Selama ini perempuan telah memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2021, 64,5% dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan dan memberikan kontribusi sekitar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional (Noviyanti, 2024).

Terkait dengan peluncuran RBI ini, terdapat beberapa catatan. *Pertama*, belum ada dasar hukum mengenai pembentukan atau pelaksanaan RBI, mengingat hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum RBI. *Kedua*, dinyatakan bahwa RBI merupakan kelanjutan dan penguatan dari DRPPA. Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana status DRPPA, apakah DRPPA masih tetap eksis atau ditiadakan dengan munculnya RBI. *Ketiga*, hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta indikator pelaksanaan RBI. Tidak ada rincian mengenai pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab melaksanakan RBI, bagaimana pelaksanaannya, dari mana sumber dananya, apakah ada monitoring dan evaluasi, dan seterusnya.

Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Terlepas dari ketiga catatan tentang RBI tersebut di atas, peluncuran RBI diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan dapat berkontribusi nyata dalam melakukan akselerasi kesetaraan gender melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri KPPPA, RBI merupakan kelanjutan Program DRPPA. Sejak dicanangkan pada akhir 2020 oleh KemenPPPA bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebanyak 138 desa telah menjadi model pengembangan DRPPA (Biro Humas dan Hukum Kemen PPPA, 2023). Terdapat 10 indikator yang harus dicapai dalam pelaksanaan DRPPA, 5 indikator terkait kesiapan kelembagaan desa dan 5 indikator lainnya merupakan indikator substansi prioritas KemenPPPA, yaitu (1) pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; (3) penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) penurunan pekerja anak; dan (5) pencegahan perkawinan anak. Dari lima indikator tersebut, tiga indikator di antaranya terkait dengan perempuan.

Untuk mengoptimalkan RBI dalam melakukan akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan, indikator pertama DRPPA, yaitu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, dapat dimanfaatkan. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PPPA, RBI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, tujuan tersebut harus dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan. Selain KemenPPPA sebagai *leading sector*, kegiatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti

Kementerian UMKM, dinas UMKM tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun dinas lain yang terkait, serta pihak swasta seperti pengusaha dan unsur masyarakat lainnya, termasuk pihak perbankan.

Dinas lain yang terkait misalnya Dinas Kesehatan yang berperan dalam membantu pengurusan izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). P-IRT dibutuhkan agar produk memiliki standar produksi dan dapat memperluas distribusi produk. Salah satu persyaratan dalam pengurusan P-IRT yaitu surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan (Sari, 2021). Sedangkan SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan bupati/walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan.

Hal lain yang penting dalam pelatihan dan pendampingan kewirausahaan ini adalah aspek permodalan. Agar peserta pelatihan dapat memulai usahanya, dibutuhkan modal. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan pihak perbankan.

Penutup

RBI bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak, namun masih terdapat beberapa catatan terkait dengan RBI. *Pertama*, RBI belum memiliki dasar hukum. *Kedua*, Program DRPPA yang sebelumnya sudah ada, belum jelas statusnya. *Ketiga*, belum ada juklak dan juknis RBI, termasuk pihak yang bertanggung jawab, sumber dana, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Meskipun demikian, RBI tetap dapat dimanfaatkan untuk akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. DPR RI melalui Komisi VIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat mendorong KemenPPPA untuk membuat dasar hukum RBI berikut juklak dan juknis, serta memperjelas status DRPPA sehingga RBI lebih optimal dalam melakukan akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Referensi

- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan [Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA]. (2023, Maret 11). *Kemen PPPA bagikan praktik baik pengelolaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak* [Siaran Pers Nomor: B-108/SETMEN/HM.02.04/3/2023]. *Kemen PPPA*. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NDQ0Mg==>
- Dewi, A. P. (2025, Januari 25). KPPPA: Ruang Bersama langkah awal bebas dari kekerasan perempuan-anak. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4602038/kpppa-ruang-bersama-langkah-awal-bebas-dari-kekerasan-perempuan-anak>
- IWD 2025 campaign theme is 'Accelerate Action'. (2025). *Internasional Womens' Day*. <https://www.internationalwomensday.com/2025theme>
- Kono, R. (2025, Januari 19). Kementerian PPPA luncurkan program "Ruang Bersama Indonesia" di Bali. *Indonesiasatu.co*. <https://indonesiasatu.co/detail/kementerian-pppa-luncurkan-program-ruang-bersama-indonesia-di-bali>
- Noviyanti, S. (2024, Oktober 22). Peran Strategis Womenpreneur dalam Mendorong Kebangkitan UMKM. *kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/10/22/080900626/peran-strategis-womenpreneur-dalam-mendorong-kebangkitan-umkm->
- Sari, A. R. (2021, Oktober 20). Inilah persyaratan dan cara mengurus izin P-IRT bagi UMKM. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-persyaratan-dan-cara-mengurus-izin-p-irt-bagi-umkm-462583>
- Widya, A. (2025, Februari 25). Tema International Women's Day 2025: 'Accelerate Action' untuk kesetaraan gender. *Parapuan*. <https://www.parapuan.co/read/534221057/tema-international-womens-day-2025-accelerate-action-untuk-kesetaraan-gender>
- Wisnubroto, K. (2024, Desember 22). Perempuan dan anak berdaya bersama. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8855/perempuan-dan-anak-berdaya-bersama>
- World Economic Forum. (2024). *Global gender gap Report 2024*. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/digest/>